

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA



Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Samarinda, 06 Januari 2025

Kepala Kantor,

Washington Saut Dompok

NIP 198307042003121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggungjawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Lain-Lain	40



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 11 Januari 2025

Kepala Kantor,

Washington Saut Dompok



NIP 198307042003121003

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp29.621.273.521,- atau mencapai 258.62 persen dari target PNBPN sebesar Rp11.453.461.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp28.009.909.110,- atau mencapai 99.12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp28.259.779.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp80.418.188.534,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.828.211.128,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp78.520.190.978,- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp69.786.428,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.513.759.019,- dan Rp78.563.406.028,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.225.393.648,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp22.356.421.779,- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.578.771.869,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp696.214.887,- dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp5,565,186,756,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp66.866.374.421,- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp7.274.986.756,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(2.381.815.788,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.513.660.639 serta Kenaikan/ Penurunan Ekuitas sebesar Rp11.697.031.607,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp78.563.406.028,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024		% THD ANGG	TA 2023
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN				
-Penerimaan Negara Bukan Pajak	11.453.461.000	29.621.273.521	258,62	23.417.033.682
JUMLAH PENDAPATAN	11.453.461.000	29.621.273.521	258,62	23.417.033.682
BELANJA				
-Belanja Pegawai	4.482.897.000	4.481.594.712	99,97	3.947.534.550
-Belanja Barang	10.385.352.000	10.207.767.017	98,29	6.643.715.259
-Belanja Modal	28.259.779.000	28.009.909.110	99,12	347.264.582
-Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	43.128.028.000	42.699.270.839	99,01	10.938.514.391

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

NERACA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023
ASET		
ASET LANCAR		
Persediaan	1.828.211.128	815.957.105
JUMLAH ASET LANCAR	1.828.211.128	815.957.105
ASET TETAP		
Tanah	54.870.821.660	54.870.821.660
Peralatan dan Mesin	19.951.248.480	10.586.937.745
Gedung dan Bangunan	17.959.334.148	11.854.005.767
Aset Tetap Lainnya	104.842.500	104.842.500
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14.366.055.810)	(11.213.438.655)
JUMLAH ASET TETAP	78.520.190.978	66.203.169.017
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	22.845.962	21.876.197
Aset Lain-lain	2.899.808.177	1.499.411.912
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(2.852.867.711)	(1.521.288.109)
JUMLAH ASET LAINNYA	69.786.428	0
JUMLAH ASET	80.418.188.534	67.019.126.122
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.696.759.019	35.416.687
Pendapatan Diterima di Muka	1.817.000.000	117.335.014
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.513.759.019	152.751.701
EKUITAS		
Ekuitas	78.563.406.028	66.866.374.421
JUMLAH EKUITAS	78.563.406.028	66.866.374.421
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	82.077.165.047	67.019.126.122

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)



URAIAN	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	27.225.393.648	23.025.123.890
JUMLAH ASET PENDAPATAN	27.225.393.648	23.025.123.890
BEBAN		
Beban Pegawai	4.481.594.712	3.947.534.550
Beban Persediaan	6.348.125.223	3.853.074.614
Beban Barang dan Jasa	6.175.708.789	4.373.953.912
Beban Pemeliharaan	629.375.073	746.944.075
Beban Perjalanan Dinas	2.704.226.778	1.195.697.066
Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.017.391.204	773.037.111
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
JUMLAH BEBAN	22.356.421.779	14.890.241.328
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	4.868.971.869	8.134.882.562
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	6.300.000
-Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	6.500.000
-Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	200.000
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
-Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
-Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	696.214.887	283.243.208
-Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	696.214.887	285.474.778
-Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2.231.570
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	696.214.887	289.543.208
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.565.186.756	8.424.425.770
POS LUAR BIASA		
Beban Luar Biasa	0	0
POS LUAR BIASA	0	0
SURPLUS/ DEFISIT LO	5.565.186.756	8.424.425.770

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	66.866.374.421	66.545.230.240
SURPLUS/ DEFISIT LO	5.565.186.756	8.424.425.770
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(2.381.815.788)	(117.353.500)
-PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0
-KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
-KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0
-SELISIH REVALUASI ASET	0	0
-KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2.381.815.788)	(117.353.500)
LAIN-LAIN	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8.513.660.639	(7.985.928.089)
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	11.697.031.607	321.144.181
EKUITAS AKHIR	78.563.406.028	66.866.374.421

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Keimigrasian. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.02.PR.07.04 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Samarinda berdasarkan Surat Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 yang saat ini entitas kantor berada di Jl. Ir. H. Juanda No. 45 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berkomitmen dengan visi *"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas."* Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Imigrasi Kelas TPI I Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas TPI I Samarinda adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan LRA*
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
 - Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan LO

- Pendapatan LO*
- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja*
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi Anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Rp29.621.27

3.521,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada TA 2024 adalah sebesar Rp 29.621.273.521,-. Pendapatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda terdiri dari Pendapatan paspor Rp24.700.400.000,-; Pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali Rp3.658.300.000,-; Pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya Rp558.100.000,-; Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp8.258.634,-; Pendapatan penerimaan kembali belanja barang TAYL Rp696.214.887,-; dan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Rp0,- .

URAIAN	TA 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Paspor	8.327.500.000	24.700.400.000	296,61
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	2.443.250.000	3.658.300.000	149,73
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	669.200.000	558.100.000	83,40
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13,511,000	8.258.634	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	696.214.887	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	100,00
JUMLAH	11.439.950.000	29.621.273.521	258,93

Rincian Realisasi Pendapatan

PNBP Kanim Samarinda 2024 mengalami kenaikan (26,49%) persen secara keseluruhan dibandingkan dengan TA 2023 karena pada tahun 2024 namun jika dilihat secara detil maka akan terlihat bahwa kenaikan PNBP terdapat pada pendapatan paspor di karenakan banyaknya masyarakat yang melaksanakan ibadah Umrah/haji, berlibur di luar negeri dan efek dari informasi kenaikan harga paspor yang akan di terapkan di tahun 2025 sehingga masyarakat banyak melakukan permohonan pembuatan paspor baru atau penggantian paspor. sedangkan pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali menurun dari tahun sebelumnya di sebabkan karena beberapa Perusahaan yang memperkerjakan TKA tidak lagi memperpanjang kontrak TKA. Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan juga mengalami penurunan karena pada tahun 2023 terdapat pendapatan kantin sedangkan pada tahun 2024 tidak ada pendapatan sewa kantin. Pada tahun 2024 pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang sudah rusak berat sebesar Rp0

karena tidak ada penghapusan BMN,- serta penerimaan kembali belanja barang TAYL berupa pengembalian belanja sewa speedboat TAYL sebesar Rp696.214.887,-.

URAIAN	REALISASI		
	TA 2024	TA 2023	%
Pendapatan Paspor	24.700.400.000	16.671.650.000	48,16
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	3.658.300.000	5.767.150.000	-36,57
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	558.100.000	663.700.000	-15,91
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.258.634	22.558.904	-63,39
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	696.214.887	285.474.778	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6.500.000	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0,00
JUMLAH	29.621.273.521	23.417.033.682	26,49

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp42.699.268.825,- atau 99.01 persen dari anggaran belanja sebesar Rp43.128.028.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut :

Rp42.699.268.825,-

URAIAN	TA 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg
Belanja Pegawai	4.482.897.000	4.481.594.712	99,97
Belanja Barang	10.385.352.000	10.207.767.017	98,29
Belanja Modal	28.259.779.000	28.009.909.110	99,12
Total Belanja Kotor	43.128.028.000	42.699.270.839	99,01
Pengembalian Belanja Pegawai	-	2.014	
Pengembalian Belanja Barang	-	0	
JUMLAH	43.128.028.000	42.699.268.825	99,01

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp4.481.592.698,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.481.592.698,- dan Rp3.947.534.550,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,53 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penambahan pegawai Kantor Imigrasi Samarinda berupa CPNS dan pegawai pindahan dari Kantor Wilayah dan UPT lainnya.

URAIAN	REALISASI		
	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.481.592.698	3.947.534.550	13,53
Belanja Barang	10.207.767.017	6.643.715.259	53,65
Belanja Modal	28.009.909.110	347.264.582	7.965,87
JUMLAH	42.699.268.825	10.938.514.391	290,36

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI		
	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.395.417.712	3.947.534.550	11,35
Belanja Lembur	86.177.000	68.731.000	25,38
Jumlah Belanja Kotor	4.481.594.712	4.016.265.550	11,59
Pengembalian Belanja Pegawai	2.014	454	343,61
JUMLAH	4.481.592.698	4.016.265.096	11,59

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

B.4. Belanja Barang

Belanja Realisasi belanja barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing
Barang sebesar Rp10.207.765.003,- dan Rp6.661.065.259,-. Pada TA 2024
Rp10.207.76 mengalami kenaikan 53,65 persen dari realisasi TA 2023. Hal ini antara
5.003,- lain disebabkan karena adanya permintaan ABT (Anggaran Belanja
 Tambahan) tahap I dan Tahap II Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda
 di Tahun Anggaran 2024

URAIAN	REALISASI		
	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.453.837.671	1.312.696.726	10,75
Belanja Barang Non Operasional	3.064.888.565	1.546.972.962	98,12
Belanja Barang Persediaan	711.160.076	332.670.475	113,77
Belanja Jasa	1.654.616.734	1.524.758.005	8,52
Belanja Pemeliharaan	619.037.193	748.270.025	(17,27)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.704.226.778	1.195.697.066	126,16
JUMLAH BELANJA KOTOR	10.207.767.017	6.661.065.259	53,25
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	2.014	17.350.000	0,00
JUMLAH	10.207.765.003	6.643.715.259	53,65

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Persediaan

Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 **Rp1.828.211.128,-** masing-masing adalah sebesar Rp1.828.211.128,- dan Rp815.957.105,- **128,-** Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	1.825.496.398	814.974.355
Bahan untuk Pemeliharaan	2.714.730	982.750
Suku Cadang	0	0
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
JUMLAH	1.828.211.128	815.957.105

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

C.2. Tanah

Tanah

Rp54.870.821.660,-

1.660,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.870.821.660,- mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SALDO NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2024	54.870.821.660
Mutasi Tambah	0
Koreksi Nilai Tanah	0
Mutasi Kurang	0
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	54.870.821.660

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

NO	LUAS	LOKASI	NILAI
1	3.850 M2	Jl. Ir. H. Juanda Samarinda	28.949.390.000
2	1.750 M2	Jl. Ir. H. Juanda No 45 Samarinda	13.457.110.000
3	1.395 M2	Jl. M. Yamin Samarinda	11.848.451.000
4	1.252 M2	Jl. M. Yamin Samarinda	615.870.660
JUMLAH			54.870.821.660

Tanah seluas 3.850 m2 berupa Rumah Dinas Imigrasi. Tanah seluas 1.750 m2 merupakan Kantor Imigrasi Samarinda. 1.395 m2 merupakan Rumah Karantina WNA Kantor Imigrasi Samarinda. Tanah seluas 1.252m2 merupakan UKK Bontang.

C.3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp19.951.248.480,- dan Rp10.586.937.745,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	ASET TETAP	2024		2023	
		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	Peralatan dan Mesin	19.951.248.480	9.260.630.124	10.586.937.745	9.232.846.893
	Koreksi Penyusutan	0	0	0	0
	Total Koreksi Penyusutan	19.951.248.480	9.260.630.124	10.586.937.745	9.232.846.893

Rincian Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin TA 2024

C.4. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp17.959.334.148,- dan Rp11.854.005.767,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

NO	ASET TETAP	2024		2023	
		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	Gedung dan Bangunan	17.959.334.148	5.105.425.686	11.854.005.767	1.980.591.762
	Koreksi Penyusutan	0	0	0	0
	Total Koreksi Penyusutan	17.959.334.148	5.105.425.686	11.854.005.767	1.980.591.762

Rincian Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan TA 2024

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp104.842.500,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp104.842.500,-. Aset tetap tersebut berupa Monografi, Lukisan kayu dan Lukisan batu/Keramik/ Lain-lain pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk TA 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

NO	ASET TETAP	2024	2023
		NILAI PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
1	Aset Tetap lainnya	104.842.500	104.842.500
	Koreksi Penyusutan	0	0
	Total Koreksi Penyusutan	104.842.500	104.842.500

Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya TA 2024

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(14.366.055.810,-) dan Rp(10.826.413.206,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp1(4.366.055.810,-) dan Rp(10.826.413.206,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	19.951.248.480	-9.260.630.124	10.690.618.356
2	Gedung dan Bangunan	17.959.334.148	-5.105.425.686	12.853.908.462
Akumulasi Penyusutan		37.910.582.628	-14.366.055.810	23.544.526.818
Koreksi Penyusutan		0	0	0
Total Koreksi Penyusutan		37.910.582.628	-14.366.055.810	23.544.526.818

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

C.7. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Rp2.899.808.277,-

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp2.899.808.277,- dan Rp1.499.411.912,-. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun nilai Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan sebagai berikut :

NO	ASET TETAP	2024		2023	
		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.899.808.177	2.830.021.749	1.499.411.912	1.499.411.912
Koreksi Penyusutan		0	0	0	0
Total Koreksi Penyusutan		2.899.808.177	2.830.021.749	1.499.411.912	1.499.411.912

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan TA 2024

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Rp(2.852.867.711,-)

C.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(2.852.867.711,-) dan Rp(1.521.288.109,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/ AMORTISASI	NILAI BUKU
Software	22.845.962	(22.845.962)	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2.899.808.177	(2.830.021.749)	69.786.428
JUMLAH	2.922.654.139	(2.852.867.711)	69.786.428
Aset Lain-Lain	0	0	0
JUMLAH	2.922.654.139	(2.852.867.711)	69.786.428

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

C.9. Ekuitas

Ekuitas
Rp80.273.20
6.028,-

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp78.563.406.028,- dan Rp66.866.374.421,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

URAIAN	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	66.866.374.421	66.545.230.240
SURPLUS/ DEFISIT LO	5.565.186.756	8.424.425.770
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(2.381.815.788)	(117.353.500)
-PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0
-KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
-KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0
-SELISIH REVALUASI ASET	0	0
-KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2.381.815.788)	(117.353.500)
LAIN-LAIN	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8.513.660.639	(7.985.928.089)
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	11.697.031.607	321.144.181
EKUITAS AKHIR	78.563.406.028	66.866.374.421

Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan untuk periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp29.621.273.521,- dan Rp23.430.033.682,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :
Pendapatan PNB
Rp29.621.273.521,-

URAIAN	REALISASI		
	TA 2024	TA 2023	%
Pendapatan Paspor	24.700.400.000	16.671.650.000	48,16
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	3.658.300.000	5.767.150.000	-36,57
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	558.100.000	663.700.000	-15,91
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.258.634	22.558.904	-63,39
JUMLAH	29.621.273.521	23.430.033.682	26,42

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan TA 2023

PNBP Kanim Samarinda 2024 mengalami kenaikan (26,49%) persen secara keseluruhan dibandingkan dengan TA 2023 karena pada tahun 2024 namun jika dilihat secara detil maka akan terlihat bahwa kenaikan PNBPN terdapat pada pendapatan paspor di karenakan banyaknya masyarakat yang melaksanakan ibadah Umrah/haji, berlibur di luar negeri dan efek dari informasi kenaikan harga paspor yang akan di terapkan di tahun 2025 sehingga masyarakat banyak melakukan permohonan pembuatan paspor baru atau penggantian paspor. sedangkan pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali menurun dari tahun sebelumnya di sebabkan karena beberapa Perusahaan yang memperkerjakan TKA tidak lagi memperpanjang kontrak TKA. Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan juga mengalami penurunan karena pada tahun 2023 terdapat pendapatan kantin sedangkan pada tahun 2024 tidak ada pendapatan sewa kantin.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.481.592.698,- dan Rp3.947.534.550,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.201.282.387	2.725.220.826	17,47
Beban Tunjangan- Tunjangan	1.194.133.311	1.153.582.724	3,52
Beban Lembur	86.177.000	68.731.000	-
JUMLAH	4.481.592.698	3.947.534.550	13,53

Rincian Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp6.376.297.403,-

Jumlah Beban Persediaan pada 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.376.297.403,- dan Rp3.868.496.464,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	6.348.125.223	3.853.074.614	64,75
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	28.172.180	15.421.850	82,68
Beban Penyesuaian Persediaan Lainnya	0	0	0,00
JUMLAH	6.376.297.403	3.868.496.464	64,83

Rincian Belanja Persediaan TA 2024 dan TA 2023

Beban Barang dan Jasa Rp6.665.163.232,-

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.665.163.232,- dan Rp4.373.953.912,-. Beban

Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.325.983.215	1.135.249.025	16,80
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	54.058.286	19.934.825	100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	90.000	2.627.000	(96,57)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	66.408.000	126.600.000	(47,55)
Beban Barang Operasional Lainnya	8.903.620	27.094.146	(67,14)
Beban Barang Operasional - Penanganan pandemi Covid 19	0	1.454.800	(100,00)
Beban Bahan	489.454.443	194.051.905	152,23
Beban Honor Output Kegiatan	489.454.443	13.210.000	3.605,18
Beban Barang Non Operasional Lainnya	29.980.000	1.322.361.057	(97,73)
Beban Langganan Listrik	401.246.065	379.028.949	5,86
Beban Langganan Telepon	1.757.724	1.645.382	6,83
Beban Langganan Air	15.227.406	14.503.823	4,99
Beban Sewa	1.183.920.908	1.114.418.000	6,24
Beban Jasa Profesi	36.800.000	5.000.000	100,00
Beban Jasa Lainnya	16.425.000	16.775.000	(2,09)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	0	0	100,00
JUMLAH	6.665.163.232	4.373.953.912	52,38

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp629.375.073,- dan Rp Rp746.944.075,- . Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena berkurangnya alokasi anggaran pada beban pemeliharaan peralatan mesin dan

persediaan bahan untuk pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan untuk adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	249.400.374	389.141.001	(35,91)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351.802.519	342.381.224	2,75
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	28.172.180	15.421.850	0,00
JUMLAH	629.375.073	746.944.075	(15,74)

Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.704.226.
778,-*

Beban Perjalanan tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.704.226.778,- dan Rp1.195.697.066,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.353.333.778	976.367.066	141,03
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.100.000	22.010.000	100,36
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.425.000	29.380.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	287.368.000	167.940.000	100,00
JUMLAH	2.704.226.778	1.195.697.066	126,16

Rincian Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Samarinda memberikan pelayanan Keimigrasian berupa pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Paspor dan Ijin Tinggal kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.017.391.204,- dan Rp386.011.662,-
Penyusutan dan Amortisasi Rp2.017.391.204,-
Amortisasi Rp2.017.391.204,-
Rp2.017.391.204,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.017.391.204,- dan Rp386.011.662,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.273.706.640	202.383.403	529,35
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	734.708.136	183.498.259	300,39
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0,00
Beban Amortisasi Software	0	0	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	8.976.428	130.000	6.804,94
JUMLAH	2.017.391.204	386.011.662	422,62

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023

D.9. Kegiatan Non Operasional

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Rp696.214.887,- dan Rp289.893.208,-
Kegiatan Non Operasional Rp696.214.887,-
Operasional Rp696.214.887,-
Rp696.214.887,-
87,-,-

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp696.214.887,- dan Rp289.893.208,-. Pendapatan pelepasan asset non lancar sebesar Rp0-. Beban pelepasan asset Rp0,- dan Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp696.214.887,- adalah penerimaan kembali belanja barang TAYL berupa pengembalian kelebihan biaya temuan BPK. Dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	6.500.000	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	(200.000)	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	696.214.887	285.474.778	143,88
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(1.881.570)	(100,00)
JUMLAH	696.214.887	289.893.208	140,16

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas awal pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp66.866.374.421,- dan Rp66.545.230.240,-.
Rp66.866.374.421,-

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus LO Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.565.186.756,- dan Rp8.424.425.770,-. Surplus/ defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Rp5.565.186.756,-

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi seluruh bidang tanah milik satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.
Rp0,-

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp(2.381.815

.788,-)

E.3.2. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp(2.381.815.788,-) dan Rp(117.353.500,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi ini adalah aset tetap non revaluasi yang disebabkan karena adanya penyusutan hibah masuk dari bontang di kanwil.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp8.513.660.639,- Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.513.660.639,- dan Rp(7.985.928.089,-) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan Bendahara Umum Negara.

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
Ditagihkan ke Entitas Lain	28.009.909.110
Diterima dari Entitas Lain	(29.621.273.521)
Transfer Masuk	9.919.692.050
Pengesahan Hibah Langsung	205.333.000
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0
JUMLAH	8.513.660.639

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp28.009.909.110,- sedangkan DDEL sebesar Rp(29.621.273.521,-).

E.4.2. Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL

dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.516.114.754,-,- terdiri dari:

NO	JENIS	ENTITAS ASAL	NILAI
1	Barang Konsumsi	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1.825.496.398
2	Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	19.951.248.480
3	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(9.260.630.124)
4	Software	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	22.845.962
5	Akumulasi Amortisasi Software	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(22.845.962)
JUMLAH			12.516.114.754

Sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0,-.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 *Rp78.563.406.028,-* adalah masing-masing sebesar *Rp78.563.406.028,-* dan *6.028,-* *Rp67.253.749.870,-*.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca Laporan Keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

Tidak Terdapat Pengungkapan Lain-Lain setelah tanggal Neraca Laporan Keuangan Ini.

Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada (408479) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda antara lain sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA UNIT
ORGANISASI TAHUN
ANGGARAN 2024**

Kementerian/Lembaga : (13) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
 Satuan Kerja : (408479) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : (03.03) Pembinaan Hukum
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan (WA) Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : (16) Kalimantan Timur (046) Kota Samarinda

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5,447,960,000	1,814,031,371	33.30	108,381	65,916	Orang/ Operasi/ Laporan	60.82	
WA.6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	19,933,386,000	4,505,281,561	22.60	91	24	Layanan/ Unit	26.35	
	Subtotal	25,381,346,000.00	6,319,312,932.00	24.90	108,472	65,940		60.79	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)	-	-	0	0	0			
	Total	25,381,346,000.00	6,319,312,932.00	24.90	108,472	65,940		60.79	

*Keterangan: Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan





DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

No.	Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Status Konfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BAA	001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	1,074,400,000	1,061,648,529	38000	Orang	43841	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	38000	38000	100
2	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BAA	002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	241,332,000	241,244,494	2500	Orang	1786	71	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	TIME EFFICIENT	2500	2500	71.44
3	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BHB	U01	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	1,166,517,000	1,073,510,723	36	operasi	69	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	TIME EFFICIENT	36	36	100
4	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BHB	U02	Operasi Mandiri di Wilayah	674,163,000	608,906,641	24	operasi	25	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	24	24	100
5	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BHB	U03	Operasi Gabungan di Wilayah	342,060,000	300,203,800	6	operasi	6	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	TIME EFFICIENT	6	6	100
6	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BHB	U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	101,690,000	93,377,414	1	operasi	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	TIME EFFICIENT	1	1	100
7	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BIB	001	Tindakan Administratif Keimigrasian	416,625,000	272,827,500	8	Orang	8	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	TIME EFFICIENT	8	8	100
8	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BIB	002	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	486,255,000	458,441,801	65000	Orang	103365	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	TIME EFFICIENT	65000	65000	100
9	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BKA	001	Pengawasan Orang Asing	422,916,000	415,357,750	6	laporan	6	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	TIME EFFICIENT	6	6	100
10	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	BF	5254	BKA	U01	Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut	744,144,000	735,000,000	2800	laporan	5011	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	TIME EFFICIENT	2800	2800	100
11	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBA	956	Layanan BMN	4,080,000	4,080,000	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI SAMARINDA

12	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBA	962	Layanan Umum	710,667,000	616,085,038	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
13	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	770,574,000	662,974,633	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
14	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBA	994	Layanan Perkantoran	7,045,942,000	6,910,596,106	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
15	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBB	951	Layanan Sarana Internal	7,219,711,000	7,215,219,000	134	Unit	134	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	134	134	100
16	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBB	971	Layanan Prasarana Internal	6,171,819,000	6,039,844,029	9	Unit	9	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	9	9	100
17	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	439,470,000	397,457,953	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
18	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	56,396,000	54,659,416	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
19	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	33,542,000	32,939,870	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
20	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	046	12	WA	6232	EBD	961	Layanan Reformasi Kinerja	137,476,000	137,462,050	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid			MAXIMIZE	STABILIZED	1	1	100
Total Nilai																						1,971.4		
Jumlah Output																						2		